

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sinergisitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2016 dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Didalam dokumen tersebut menjabarkan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN, APBD Kabupaten, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun (RKPD), perlu mendapat dukungan penganggarnya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) menggunakan sumber penganggaran dari dana APBD Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 155 dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2016 dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan. Maka dalam implementasi tahun berjalan dapat dituang dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2016. Selanjutnya hal ini menjadi dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun 2016.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan KU-PAPBD Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk mengakomodir perubahan kebijakan-kebijakan, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada program prioritas yang sesuai dengan anggaran maksimum yang diberikan kepada SKPD, sehingga terpenuhinya target pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya berdasarkan program-program yang lebih realistis dengan pemanfaatan alokasi sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif, yang berdampak pada minimalisasi resiko.

Selanjutnya dengan penyusunan Perubahan KU-APBD merupakan acuan untuk memastikan proses penyusunan PAPBD selaras dengan RKPD serta menjadi acuan penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2016.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Perubahan KU-APBD Tahun Anggaran 2016, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 dan telah direvisi dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2016;
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2016;
26. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Nomor : 180/HK-NK.KUA/2/2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran
12/MoU-DPRD/RIS/2016
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KU-PAPBD selanjutnya dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dimaksudkan agar terdapat :

- Kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang dasar Penyusunan RPAPBD tahun 2016;
- Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Keserasian dan keselarasan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya daerah, asumsi makro ekonomi serta perkiraan penerimaan dan alokasi belanja Tahun 2016 dengan sumber pembiayaan dari Perubahan APBD Kabupaten Natuna.

Bahwa dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna bersama DPRD Kabupaten Natuna pada 5 februari 2016 lalu menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. Dalam implementasi tahun berjalan terjadi perubahan terhadap

pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan di asumsikan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.155.500.000.000,00,- dan mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp. 1.190.317.652.245,11,- sisa lebih perhitungan di perkirakan sebesar Rp. 0.00,- setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan sisa lebih perhitungan tahun 2015 sebesar Rp. 2.358.943.614,94,-. Selanjutnya anggaran belanja yang semula diperkirakan Rp 1.155.500.000.000,- bertambah menjadi Rp. 1.192.676.395.860,05,- atau naik Rp. 37.176.595.860,05,- (3,22 persen). Belanja tidak langsung bertambah menjadi 511.286.962.872,00 naik 2,26 persen dan belanja langsung menjadi sebesar Rp. 681.389.632.988,05 naik sebesar 3,95 persen.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional yang tercermin pada nilai PDRB dari tahun ke tahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil adalah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan percepatan pembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi masih meningkat mencapai 6,73 persen sedangkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 6,60 persen. Untuk tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,88 persen.

Sedangkan pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi di prediksi sebesar 6,56 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di karenakan beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan yaitu lapangan usaha konstruksi dan sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, lapangan usaha Pertambangan dan pengalihan, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan pergudangan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi ditahun 2013 dicapai oleh lapangan usaha Kategori Transportasi dan Pergudangan yaitu 13,01 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki kontribusi terbesar kedua sebesar 9,42 persen. Untuk lapangan usaha konstruksi memberi kontribusi sebesar 9,24 persen. Untuk Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki kontribusi pertumbuhannya sebesar 8,01 persen. Sedangkan yang Kelima adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang memiliki kontribusi sebesar 5,58 persen. Sedangkan lapangan usaha ekonomi PDRB yang lainnya mencatat pertumbuhan yang positif.

2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Secara umum laju inflasi nasional sampai juni tahun 2016 sebesar 0,66 persen. Namun sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juni 2016 di Kabupaten Natuna terjadi inflasi sebesar 0,4 persen, sedangkan dua daerah tingkat dua lainnya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi yaitu Kota Batam sebesar 1,46 persen dan kota Tanjungpinang

sebesar 1,22 persen. Inflasi di Kabupaten Natuna disebabkan oleh naiknya indeks harga kelompok sandang sebesar 1,71 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,01 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,48 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen. kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,09 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga adalah kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar -0,34 persen; Laju inflasi tahun kalender Januari - Desember 2016 di Kabupaten Natuna sebesar 0,86 persen. Laju inflasi 'year on year' Kabupaten Natuna sebesar 3,39 persen.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Pertumbuhan penduduk yang cukup besar akan menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang ada. Hal ini kemudian membawa dampak semakin besarnya jumlah orang yang mencari pekerjaan ataupun jumlah orang yang menganggur.

Masalah kependudukan memiliki posisi penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta. Sebagai daerah yang sedang membangun aspek kependudukan bersifat dinamis dan akan terus mengalami perubahan. Pembangunan berbagai sektor berdampak pada perkembangan jumlah penduduk yang relatif pesat.

Sebagai daerah yang sedang membangun, Penduduk Kabupaten Natuna tahun 2015 berjumlah 74.520 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 38.410 (51,54%) dan penduduk perempuan berjumlah 36.110 (48,46%) dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1,43%. Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kabupaten Natuna tahun 2015 sebesar 37,24 jiwa per km². Ini artinya dalam wilayah seluas 1 km² terdapat penduduk sekitar 37 jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan

Midai sebesar 296,86 jiwa per km² dan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Bunguran Utara sebesar 9,87 jiwa per km².

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah kecamatan Bunguran Timur dengan jumlah penduduk 26.127 jiwa dan yang terkecil adalah penduduk kecamatan Pulau Laut sebesar 2.435 jiwa.

Tabel. 1.
Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2015

Kecamatan <i>District</i> (1)	Luas (Km²) <i>Area</i> (2)	Penduduk <i>Population</i> (3)	Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i> (4)
1. Midai	26,10	5.183	196,86
2. Bunguran Barat	448,46	11.231	25,04
3. Bunguran Utara	404,71	3.993	9,87
4. Pulau Laut	37,69	2.435	64,61
5. Pulau Tiga	67,87	4.960	73,08
6. Bunguran Timur	146,83	26.127	177,94
7. Bunguran Timur Laut	235,01	4.457	18,97
8. Bunguran Tengah	172,71	2.995	23,45
9. Bunguran Selatan	233,99	2.607	11,14
10. Serasan	43,65	4.956	113,54
11. Subi	160,93	2.810	17,46
12. Serasan Timur	23,35	2.811	120,39
Jumlah 2015 <i>Total 2015</i>	2001,30	74.520	37,24
Jumlah 2014 <i>Total 2014</i>	2001,30	73.470	36,71

Sumber : Natuna dalam angka Tahun 2015

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi itu perlu dilakukan penyerapan tenaga kerja semaksimal mungkin.

b. Kesempatan Kerja

Sektor jasa dan pertanian masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk yang masing-masing mencapai 10.176 orang dan 7.182 orang. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Natuna pada tahun 2015 mencapai 10,54 persen dapat dilihat pada Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2.
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	6.668	514	7.182
2. Pertambangan dan Penggalian	901	149	1.050
3. Industri	652	742	1.394
4. Listrik, Gas & Air Bersih	235	0	235
5. Konstruksi	2.277	0	2.277
6. Perdagangan, Rumah makan dan jasa akomodasi	2.214	2.870	5.084
7. Transportasi, pergudangan dan Komunikasi	696	0	696
8. Lembaga Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	655	66	721
9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	6.198	3.978	10.176
Jumlah	20.496	8.319	28.815

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menempatkannya sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Perhitungan IPM dengan Metode baru di Kabupaten Natuna dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Natuna tahun 2015 sebesar 70,87. IPM Kabupaten Natuna mengalami peningkatan hingga 0,81. Hal ini bisa menjadi indikasi cukup berhasilnya program-

program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia yang diharapkan. Angka IPM Kabupaten Natuna terus meningkat di setiap tahunnya, pada Tahun 2011 sebesar 67,76, Tahun 2012 sebesar 68,80, tahun 2013 sebesar 69,39 pada tahun 2014 sebesar 70,06. Sedangkan di tahun 2015 IPM Kabupaten Natuna meningkat menjadi 70,87. Angka IPM ini dipengaruhi oleh komponen-komponen sebagai berikut.

1. Angka harapan hidup saat lahir sebesar 63,64 tahun.
2. angka harapan lama sekolah sebesar 13,85 tahun
3. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,45 tahun.
4. Pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar Rp. 13,612,000 setahun

Dengan capaian IPM yaitu sebesar 70,87 pada tahun 2015, saat ini Kabupaten Natuna menempati peringkat 4 se-provinsi Kepulauan Riau.

Tabel. 3.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kab. Natuna, 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,37	68,43	68,57	63,24	63,64
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,08	13,29	13,50	13,84	13,85
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,33	7,75	7,87	8,07	8,45
Pengeluaran Rata-rata Perkapita (Ribu Rp)	13.101	13.253	13.389	13.414	13.612
IPM	67,76	68,80	69,39	70,06	70,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Berbagai program pembangunan pendidikan secara berkala telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna antara lain program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan luar sekolah, program peningkatan mutu pendidik dan mutu pendidikan dan program lain yang terkait dengan bantuan pendidikan seperti beasiswa, bagus, bross, insentif bagi tenaga pengajar dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya dapat menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas dan berkompetensi.

Keberhasilan pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator antara lain adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (EYS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Pengeluaran Perkapita. Kabupaten Natuna pada Tahun 2015 memiliki nilai AHH sebesar 63,64 tahun angka harapan lama sekolah sebesar 13,85 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna mencapai 8,45 tahun. Dan pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar Rp.13.612.000 setahun

Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) sebesar 13,85 tahun. Artinya, ketika seorang anak masuk sekolah SD pada usia 7 tahun, diharapkan anak tersebut akan mampu bertahan untuk melanjutkan sekolahnya hingga perguruan tinggi setara diploma I. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Natuna dari tahun 2011 hingga tahun 2015 meningkat. Pada tahun 2011, harapan lama sekolah sebesar 12,08 tahun sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,77 menjadi 13,85 persen

Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 15 tahun ke atas di kabupaten Natuna pada tahun 2015 sebesar 8,45 tahun. Artinya penduduk kabupaten Natuna yang berusia diatas 15 tahun rata-rata memiliki tingkat pendidikan terakhir setara kelas 2 SMP/SLTP.

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2016.

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor rill dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2016. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel. 4
Target Ekonomi Makro Kabupaten Natuna TA. 2016

No	Indikator	2014	2015	2016
1	PDRB ADHB (jutaan rupiah)	4.030.543.10	4.421.470,4	4.946.334,38
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	3.274.446.2	3.467.118,6	3.467.712,35
3	LPE	6,60%	5,88 %	6,56 %
4	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	54,86	59,333	65,09
5	PDRB perkapita ADHK (rupiah)	44,57	46,526	48.62

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2016 maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi revitalisasi dan peningkatan produktifitas sektor Perikanan, kelautan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
2. Peningkatan peran Usaha Kecil Menengah dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;

3. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dan memiliki daya saing;
4. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan program Tol Laut yang menghubungkan wilayah antar kabupaten dan kecamatan di daerah Kabupaten Natun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah untuk mendukung pengembangan dan kemajuan ekonomi;
6. Usaha peningkatan investasi dan akses pasar di setiap kecamatan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2016.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap mendukung program "**NAWACITA**" sebagai wujud pembangunan nasional tahun 2016. Unsur-unsur pokok dalam Nawacita tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

1.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan melalui peningkatan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah serta kinerja investasi. Sumber utama penopang pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah Pengeluaran Pemerintah terutama dalam pembangunan infrastruktur, konsumsi rumah tangga, dikarenakan kinerja konsumsi rumah tangga masih didasari pada bonus demografi dan peningkatan kelompok masyarakat pendapatan menengah. Investasi diperkirakan masih meningkat dengan menciptakan iklim investasi yang baik. Kinerja Ekspor merupakan komponen penyusun PDB yang mengalami tekanan paling berat. Walaupun ada penurunan tetapi diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penyesuaian ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Tabel.5

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2016

PENGELUARAN	TAHUN 2016 (%)
Konsumsi Masyarakat	5,1
Konsumsi Pemerintah	6.0
PMTB (Investasi)	6.3
Ekspor	0.1
Dikurangi Impor	0.4
PDB	5,3

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada Tahun 2016, Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen sama dengan konsumsi tahun 2015 sebesar 5,1 persen. Relatif stabilnya laju inflasi diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, walaupun masih terdapat berbagai resiko tekanan dan kondisi yang kurang meyakinkan, akan tetapi dengan adanya

bonus demografi dan peningkatan kalangan masyarakat pendapatan kelas menengah akan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Indikator lain seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga memberikan sinyal masih kuatnya konsumsi masyarakat. Beberapa upaya pengendalian harga akan terus dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Konsumsi pemerintah dalam APBN tahun 2016 diperkirakan sebesar 6.0 persen. Konsumsi pemerintah tersebut dipengaruhi dari beberapa kebijakan realokasi belanja-belanja yang kurang produktif seperti belanja perjalanan dinas, dan paket rapat/konsinyering ke belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur dan dukungan belanja pada program-program kesejahteraan sosial.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di tahun 2016 diperkirakan sebesar 6.3 persen, lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2015 yang sebesar 5,1 persen. Ketatnya likuiditas global dan tingginya suku bunga perbankan masih menjadi kendala dalam peningkatan aktivitas investasi. Penyelenggaraan pemilu juga menjadi alasan bagi para investor untuk bersikap menunggu terhadap rencana investasinya. Disisi lain, tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menyebabkan biaya impor untuk barang modal mengalami peningkatan yang juga berdampak pada kinerja investasi.

Tahun 2016 aktivitas investasi diharapkan kembali meningkat seiring dengan program pemerintahan baru yang menekankan pada perbaikan sisi penawaran dari perekonomian melalui infrastruktur sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi. Dalam APBN tahun 2016, PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 6.3 persen dengan berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintah, antara lain realokasi belanja dengan meningkatkan porsi belanja infrastruktur, pemangkasan jalur izin usaha serta investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor impor mengalami pertumbuhan negative sebesar -2,00 persen dan -5,80 persen. Masih melambatnya ekonomi global dan volume perdagangan dunia serta negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan Jepang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor impor Indonesia. Selain itu faktor internal berupa kebijakan pembatasan ekspor

mineral juga menjadikan kinerja ekspor mengalami perlambatan sejak awal tahun 2014. Disisi lain peningkatan pertumbuhan impor disebabkan terjadinya kenaikan impor barang nonmigas.

Pertumbuhan ekspor impor dalam APBNP tahun 2016 diperkirakan sebesar 0.1 persen dan 0.4 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan dunia diharapkan akan mendorong kinerja ekspor Indonesia, walaupun ada tekanan penurunan harga komoditas global. Pemerintah berupaya untuk terus mendukung kinerja ekspor melalui upaya perbaikan struktur ekspor dari ekspor berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur, yaitu pengembangan produk ekspor olahan nonmigas dan jasa yang bernilai tambah tinggi dan kompetitif dipasar internasional. Disamping itu perkembangan global dan rantai nilai regional memberikan peluang bagi pengusaha Indonesia untuk berpartisipasi yang sekaligus dapat meningkatkan diversifikasi akses pasar ekspor bagi produk manufaktur nasional. Kinerja impor diharapkan juga akan mengalami peningkatan pada impor non migas, terutama terkait menguatnya perekonomian domestik.

Dari sisi produksi, kinerja semua sektor diperkirakan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih menjadi sektor yang diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan PDB. Sektor pertanian pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 4,2 persen. Sektor pertanian ditingkatkan dengan memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan produksi berbagai komoditi pangan lainnya, diversifikasi pangan dan stabilisasi harga pangan dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Sektor Pertanian, meskipun keberhasilannya lebih banyak bergantung pada kondisi cuaca dan alam, namun masih menjadi andalan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga halnya dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan adanya program reindustrialisasi. Pada tahun 2016 pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan berada pada kisaran 5,4 persen. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya

koridor-koridor ekonomi dalam kerangka pembangunan infrastruktur di daerah dalam peningkatan aksesibilitas.

Sektor konstruksi di tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 8,0 persen. Pertumbuhan sektor konstruksi didorong oleh berbagai proyek infrastruktur dan merupakan salah satu prioritas nasional. Sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di tahun 2016 diperkirakan 3,3 persen. Daya beli masyarakat diharapkan masih tetap terjaga sehingga mampu menjadi pendorong tumbuh sektor tersebut. Selain itu, kinerja sektor tersebut terkait juga dengan kinerja sektor industri dan impor. Perdagangan ritel, baik yang berupa lokal maupun modern, diperkirakan makin marak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

b. Harga dan *Lifting* Minyak

Setelah mengalami peningkatan selama periode tahun 2009-2010, realisasi *lifting* minyak mengalami penurunan pada tahun 2015. Realisasi *lifting* minyak dan gas diperkirakan masih akan berlanjut beberapa tahun ke depan, sementara investor sektor migas di dalam negeri ke depan akan menghadapi tantangan dari eksternal khususnya terkait rendahnya harga minyak dunia dan permasalahan internal seperti perizinan dan tumpang tindih lahan. Namun pemerintah berupaya untuk menahan laju penurunan produksi alamiah dengan melalui upaya-upaya optimalisasi produksi, pemboran sumur baru serta pemanfaatan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR)

Berdasarkan perkembangan diatas, asumsi *lifting* minyak dalam APBNP 2016 ditetapkan sebesar 830 ribu barel per hari. Pencapaian tersebut terutama didukung oleh Lapangan Banyu Urip (Blok Cepu) yang diperkirakan mencapai puncak produksi sebesar 165 ribu barel per hari pada tahun 2016. Secara keseluruhan tahun 2016, *lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.925 ribu barel setara minyak per hari.

c. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Dalam penyusunan APBNP tahun 2016 pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan fiskal seperti kebijakan di bidang pendapatan Negara, belanja Negara, dan pembiayaan anggaran, strategi dan kebijakan tersebut untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha. Upaya pemerintah dalam mengamankan

target penerimaan pajak tahun 2016 antara lain melalui penggalian potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan wajib pajak baru, dan penegakan hukum.

d. Nilai Tukar Rupiah

Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, pengawasan lalu lintas devisa, serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah volatilitas yang berlebihan, dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Penerapan bauran kebijakan makro prudensial seperti melalui penerapan instrumen *term deposit* diharapkan dapat menjaga agar arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang masih relatif besar sehingga dapat memberinilai manfaat bagi pembangunan ekonomi. Ke depan, tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah akan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia serta perlambatan ekonomi di Cina, India, dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara *emerging market* dan mendorong terjadinya *flight to quality*. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada Rp. 13.500 per dolar AS pada tahun 2016.

e. Inflasi

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk mencapai kondisi tersebut, di tengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagai faktor eksternal dan faktor internal, diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitas ekonomi makro dan pengendalian inflasi ke depan. Koordinasi kebijakan antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil semakin ditingkatkan baik di level pusat maupun daerah.

Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk pemantauan perkembangan harga, pasokan, dan distribusi dari beberapa komoditas strategis, serta menetapkan kebijakan dan langkah antisipasi yang cepat dan tepat dari kemungkinan terjadinya gejolak harga. Melalui koordinasi yang semakin luas dan terpadu tersebut, diharapkan kestabilan harga barang dan jasa dapat tercapai dan terus dipertahankan.

Pembangunan ekonomi nasional juga terus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan membaiknya investasi sehingga diharapkan dapat memenuhi peningkatan kebutuhan nasional dan memperkecil *output gap*. Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi serta pemerataan pembangunan nasional, pemerintah berencana untuk menerapkan strategi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan dalam rangka menopang kelancaran arus distribusi kebutuhan masyarakat, baik dalam maupun antar pulau di Indonesia. Dalam kaitan ini, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi pendanaan infrastruktur, antara lain dengan melakukan penajaman alokasi belanja, dari belanja subsidi untuk ditambahkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur. Dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran, membaiknya infrastruktur dan kelancaran arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta nilai tukar rupiah yang stabil, diharapkan dapat menjaga agar laju inflasi berada pada level yang rendah dan stabil, konvergen dengan laju inflasi negara-negara kawasan. Dengan berbagai sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut, didukung dengan koordinasi yang semakin mantap, serta memerhatikan perkembangan ekonomi domestik dan dunia, inflasi tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen.

f. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Berakhirnya stimulus moneter oleh the Fed pada quantitative easing (QE3) pada akhir oktober 2014 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah Indonesia. Tingkat obligasi pemerintah dengan tenor 5, 10, dan 30 tahun terlihat mengalami tekanan sejak pertengahan tahun 2013 dan terus berlanjut hingga tahun 2014. Selain faktor global,

tingkat suku bunga obligasi pemerintah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan yang bersumber dari faktor domestic seperti kenaikan laju inflasi.

Walaupun menghadapi tekanan, namun ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga Negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (tradable). Porsi kepemilikan asing pada SBN tradable pada 12 desember 2014 tercatat mencapai 38,6 persen dengan nilai nominal sebesar Rp. 470,0 triliun atau lebih tinggi disbanding posisinya pada akhir tahun 2013 yang mencapai 32,5 persen dengan nominal Rp. 323,9 triliun.

Tekanan terhadap suku bunga obligasi juga tercermin pada obligasi Negara dengan tenor pendek, seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan juga mengalami hal serupa. Rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan hingga akhir tahun 2013 mencapai 4,5 persen, lebih tinggi dari rata-rata tingkat suku bunga pada tahun sebelumnya yang mencapai 3,2 persen. Walaupun tekanan terus berlanjut di tahun 2014, namun rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan dapat dikendalikan di tingkat 5,8 persen atau lebih rendah dibandingkan proyeksi APBN 2014 sebesar 6,0 persen. Pada tahun 2016 isu rencana kenaikan suku bunga AS akan mendorong persaingan likuiditas pasar global dan akan memberikan tekanan pada suku bunga SPN 3 bulan yang diperkirakan pada kisaran 5,50 persen.

3.2 Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sebagai daerah yang sedang membangun, Penduduk Kabupaten Natuna tahun 2015 berjumlah 74.520 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 38.410 (51,54%) dan penduduk perempuan berjumlah 36.110 (48,46%) dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1,43%. Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kabupaten Natuna tahun 2015 sebesar 37,24 jiwa per km². Ini artinya dalam wilayah seluas 1 km² terdapat penduduk sekitar 37 jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Midai sebesar 296,86 jiwa per km² dan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Bunguran Utara sebesar 9,87 jiwa per km².

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi itu perlu dilakukan penyerapan tenaga kerja semaksimal mungkin.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna menunjukkan tren kecendrungan meningkat setiap tahunnya. Besaran nilai PDRB dapat menentukan struktur perekonomian suatu daerah. Struktur perekonomian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi, dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak seberapa besar kekuatan ekonomi suatu negara atau daerah. Indikator makro semacam ini sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk menentukan arah dan sasaran kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal tersebut juga menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonominya. Makin besar nilai tambah yang dapat diraih oleh suatu sektor maka semakin besarlah peranannya dalam perekonomian daerah tersebut. Besaran peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

Tabel. 6.
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Natuna Tahun 2011 – 2015 (Persen)

Lapangan Usaha/Industry	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42.63	42.19	41.55	40.37	39.82
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa	12.28	11.69	11.34	10.98	10.04
a. Tanaman Pangan	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
b. Tanaman Hortikultura	0.40	0.39	0.36	0.39	0.39
c. Tanaman Perkebunan	10.50	10.00	9.68	9.32	9.23
d. Peternakan	1.11	1.06	1.06	1.12	1.12
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17
3 Perikanan	30.14	30.30	30.31	29.20	29.20
B Pertambangan dan Penggalian	0.48	0.49	0.48	0.49	0.49
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.48	0.49	0.48	0.49	0.49
C Industri Pengolahan	3.05	2.97	2.92	2.93	2.91
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2 Industri Makanan dan Minuman	0.92	0.88	0.86	0.82	0.80
3 Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.26	0.26	0.24	0.25	0.25
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.52	0.54	0.54	0.56	0.56
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16
10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.55	0.53	0.52	0.50	0.50
11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14 Industri Alat Angkutan	0.41	0.38	0.37	0.35	0.35
15 Industri Furnitur	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.38	0.40	0.37	0.33	0.32
1 Ketenagalistrikan	0.07	0.07	0.07	0.03	0.04
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.30	0.33	0.303	0.30	0.28
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
F Konstruksi	26.11	26.54	27.11	27.80	27.84
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.59	9.52	9.37	9.70	10.90
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.07	1.98	1.98	1.98	2.18
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7.52	7.54	7.39	7.71	8.72
H Transportasi dan Pergudangan	1.93	2.05	2.17	2.32	2.58
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	0.35	0.37	0.36	0.43	0.39
3 Angkutan Laut	0.70	0.80	0.77	0.72	0.82
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
5 Angkutan Udara	0.78	0.78	0.94	1.07	1.27
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.53	1.55	1.59	1.63	1.72
1 Penyediaan Akomodasi	0.15	0.16	0.18	0.23	0.30
2 Penyediaan Makan Minum	1.38	1.39	1.41	1.40	1.42
J Informasi dan Komunikasi	2.22	2.16	2.07	2.03	2.03
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0.47	0.45	0.46	0.46	0.48
1 Jasa Perantara Keuangan	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.45	0.43	0.44	0.43	0.45
3 Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
4 Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
L Real Estat	2.26	2.25	2.18	2.17	2.22
M,N Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.32	7.41	7.73	7.77	6.61
P Jasa Pendidikan	0.60	0.63	0.64	0.65	0.66
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.12	1.11	1.09	1.08	1.13
R,S,T,U Jasa lainnya	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	100	100	100	100	100

Sumber : Sosial Ekonomi Kab. Natuna Tahun 2015

Struktur lapangan usaha apabila dilihat dari PDRB Tanpa Migas yang memberikan sumbangan terbesar di tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup Sub lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 39,82 persen ditahun 2015. Besarnya peranan lapangan usaha ini didukung oleh peranan Sub lapangan usaha Perikanan yang nilai tambahnya menyumbangkan sebesar 29,20 persen.

Pada tahun 2015 kategori konstruksi menyumbang sebesar 27,84 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna, meningkat dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 26,11 persen. Trend peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun-tahun di antaranya (2012-2014) yaitu sebesar berturut-turut 26,54 persen, 27,11 persen, dan 27,80 persen.

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang rata-rata 9 persen. Pada tahun 2015, kontribusi kategori ini sebesar 10,90 persen, dengan sebesar 8,72 persen disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sebesar 2,18 persen disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut

peraturannya. Selama tahun 2011-2015 peranannya relatif stabil dengan rata-rata 7 persen.

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Memperhatikan kecenderungan Pendapatan Daerah pada APBD dan PAPBD Tahun Anggaran 2016 cenderung mengalami penurunan. Kebijakan Keuangan Umum Keuangan Daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak,
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi,
 3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang,
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna,
 5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB,
 3. Operasional pemungutan PBB,
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan,
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB,
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB,
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB,
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Perubahan pendapatan tahun 2016 digambarkan sebagai berikut : Pendapatan di asumsikan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.155.500.000.000,00,- dan mengalami perubahan kenaikan menjadi Rp. 1.190.317.652.245,11,- sisa lebih perhitungan di perkirakan sebesar Rp. 0.00,- setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan sisa lebih perhitungan tahun 2015 sebesar Rp. 2.358.943.614,94,-. Selanjutnya anggaran belanja yang semula diperkirakan Rp 1.155.500.000.000,- bertambah menjadi Rp. 1.192.676.595.860,05,- atau naik sebesar Rp. 37.176.595.860,05,- (3,22 persen). Belanja tidak langsung bertambah menjadi Rp. 511.286.962.872,00 naik 2,26 persen dan belanja langsung menjadi sebesar Rp. 681.389.632.988,05 naik sebesar 3,95 persen.

4.2 BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.
- d. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah
- e. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga
- f. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.
- g. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dan SKPD.

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna pada Tahun 2016, pos belanja daerah mengalami kenaikan menjadi Rp.1.192.676.595.860,05,- atau terjadi kenaikan sebesar 3,22 persen, terdiri dari

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 318.882.013.603,00,- belanja subsidi tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp 21.305.597.302,00,- belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp 16.220.849.000,00,- belanja hibah turun menjadi sebesar Rp. 12.346.899.500,00,- belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 558.170.000,00,- belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 141.473.433.467,00,- dan belanja tidak terduga tetap sebesar Rp. 500.000.000,00,-. Belanja Langsung menjadi Rp. 681.389.632.988,05,- naik sebesar 3,95 persen.

4.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Strategi dan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah meliputi sumber penerimaan dan alokasi belanja daerah. Kebijakan penerimaan terutama diarahkan untuk memperkuat posisi keuangan daerah yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan utama. Sedangkan kebijakan alokasi belanja diarahkan mendukung prioritas dan program-program pembangunan daerah yang direncanakan. Sisa

pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan anggaran Tahun 2016 terdapat kenaikan dari Rp. 0,00,- menjadi Rp. 2.358.943.614,94,- (100 persen).

Tabel. 7.
Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET ANGGARAN TAHUN 2016	TARGET ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2016	BERTAMBAH/BERKURANG	
			JUMLAH	%
Pendapatan Asli Daerah	43.657.341.397,00	55.301.437.352,11	11.644.095.955,11	26,67
Hasil Pajak Daerah	5.035.000.000,00	13.746.232.000,00	8.711.232.000,00	173,01
Hasil Retribusi Daerah	546.500.000,00	308.890.000,00	-237.610.000,00	-43,48
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.170.641.644,00	-1.829.358.356,00	-36,59
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	33.075.841.397,00	38.075.673.708,11	4.999.832.311,11	15,12
Dana Perimbangan	1.012.437.873.603,00	1.004.418.742.758,00	-8.019.130.845,00	-0,79
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	505.649.039.553,00	510.378.829.508,00	4.729.789.955,00	0,94
Dana Alokasi Umum	345.284.029.000,00	345.284.029.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	161.504.805.050,00	148.755.884.250,00	-12.748.920.800,00	-7,89
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	99.404.785.000,00	130.597.472.135,00	31.192.687.135,00	31,38
Pendapatan Hibah	0,00	19.780.467.000,00	19.780.467.000,00	100,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	55.034.003.000,00	66.446.223.135,00	11.412.220.135,00	20,74
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.370.782.000,00	44.370.782.000,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.155.500.000.000,00	1.190.317.652.245,11	34.817.652.245,11	3,01
Penerimaan Pembiayaan	0,00	2.358.943.614,94	2.358.943.614,94	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00	2.358.943.614,94	2.358.943.614,94	100,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	2.358.943.614,94	2.358.943.614,94	100,00
JUMLAH DANA TERSEDIA	1.155.500.000.000,00	1.192.676.595.860,05	37.176.595.860,05	3,22

Tabel. 8.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA,
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN,
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
5.1.1.	Belanja Pegawai	307.428.120.008,00	318.882.013.603,00	11.453.893.595,00	3,73
5.1.3.	Belanja Subsidi	21.305.597.302,00	21.305.597.302,00	0,00	0,00
5.1.4.	Belanja Hibah	12.656.099.500,00	12.346.899.500,00	-309.200.000,00	-2,44
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	16.220.849.000,00	16.220.849.000,00	0,00	0,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	558.170.000,00	558.170.000,00	0,00	0,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	141.328.433.467,00	141.473.433.467,00	145.000.000,00	0,10
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	499.997.269.277,00	511.286.962.872,00	11.289.693.595,00	2,26

Tabel. 9.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
6.	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	2.358.943.614,94	2.358.943.614,94	100
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0	2.358.943.614,94	2.358.943.614,94	100
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	2.358.943.614,94	2.358.943.614,94	100
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	2.358.943.614,94	2.358.943.614,94	100

BAB.V PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2016 merupakan respon terhadap perubahan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang sedang berjalan, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah Tahun 2011 - 2016. Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2016 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan KU-PAPBD Tahun 2016, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016 akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2016.